



Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan: Pentingnya Kompetensi SDM

Nasrun Naida

Email Korespondensi : nasrunnaida79@gmail.com

Akuntansi, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 26/09/2024

Diterima: 15/10/2024

Dipublikasikan: 29/10/2024

Akreditasi oleh
Kemenristekdikti
No.79/E/KPT/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK), serta mengevaluasi pengaruh penerapan SIPD dan SPIP terhadap Kualitas. Selain itu, penelitian ini menganalisis peran Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara SIPD dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan pengujian teori melalui variabel *numerik* dan analisis statistik. Metode analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS) dalam kerangka *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan perangkat lunak *WarpPLS* 8.0. Penelitian ini melibatkan 128 responden dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, Kompetensi SDM memperkuat hubungan antara penerapan SIPD dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan, yang menandakan bahwa peningkatan kompetensi SDM dapat meningkatkan efektivitas penerapan SIPD dan SPIP dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan penerapan SIPD dan SPIP guna meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Teori Keagenan dalam menggabungkan variabel SIPD, SPIP, dan Kompetensi SDM untuk mengkaji pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Kata Kunci :

Kompetensi Sumber Daya Manusia; Kualitas Laporan Keuangan; Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Regional Government Information System (SIPD), the Government Internal Control System (SPIP), and Financial Report Quality (FRQ), as well as to evaluate the influence of SIPD and SPIP on FRQ. Additionally, this research analyzes the role of Human Resource (HR) Competence as a moderating variable in the relationship between SIPD and SPIP on FRQ. A quantitative approach was applied, focusing on testing theoretical relationships through numerical variables and statistical analysis. The Partial Least Square (PLS) method within the Structural Equation Modeling (SEM) framework was used, employing WarpPLS 8.0 software. The study involved 128 respondents from various Regional Government Organizations (OPD). The results indicate that the implementation of SIPD and SPIP has a positive and significant effect on Financial Report Quality. Moreover, HR Competence strengthens the relationship between SIPD and SPIP with FRQ, suggesting that improving HR competence enhances the effectiveness of SIPD and SPIP in producing high-quality financial reports. This study is expected to contribute significantly to local governments by providing insights into the evaluation and optimization of SIPD and SPIP implementations, thereby improving financial report accountability and transparency. The study also employs Agency Theory to combine the variables SIPD, SPIP, and HR Competence to assess their impact on Financial Report Quality.

Keywords:

Competence of Human Resources; Financial Report Quality; Government Internal Control Systems; Local Government Information Systems.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pihak yang diberikan amanah (*agent*) untuk melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20). Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk nyata dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Zubaidi *et al.*, 2019).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan tertentu (SAP, 2010). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memiliki karakteristik yang menjamin kualitas laporan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. LKPD terdiri atas beberapa komponen, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa pelaporan keuangan daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh entitas pelaporan, hasil dari konsolidasi laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit guna menilai kualitas informasi dalam laporan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak pengguna laporan keuangan ini tentunya akan mengakses laporan yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga informasi yang terkandung harus benar-benar berguna bagi mereka (Putra, 2018).

Setiap tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk opini. Melalui penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPI) diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga ke depan dapat memperoleh opini WTP berarti opini tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengembalian keputusan oleh para pemaku kepentingan (*stakeholders*) (Fathia *et al.*, 2020). Pada tahun anggaran 2021, LKPD Kabupaten Tojo Una-Una mendapat opini WTP dari BPK, yang merupakan opini WTP kesepuluh berturut-turut sejak tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Meski begitu, BPK masih menemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang harus diperbaiki. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit, semakin baik pula akuntabilitas pelaporan keuangan daerah (Furqan *et al.*, 2020).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, memastikan bahwa laporan disusun dengan benar, tepat waktu, dan sesuai standar untuk mendapatkan opini audit yang baik (Indrayani *et al.*, 2020). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa hubungan antara SPI dan kualitas laporan keuangan bisa bersifat negatif (Desipradani *et al.*, 2018; Abdullah *et al.*, 2022).

Selain SPI, Sistem Informasi juga penting dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sejak 2008. Sistem ini membantu pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Namun, sejak 2022, SIMDA digantikan oleh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang berbasis web dan mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah.

Meski telah menggunakan SIPD, penerapannya masih belum optimal karena berbagai kendala seperti kurangnya kesiapan OPD dan kompetensi dalam mengoperasikan SIPD. Oleh karena itu, BPKAD terus memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia sangat penting untuk memastikan laporan keuangan disusun dengan standar yang ditetapkan, dan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi ini memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan (Zubaidi *et al.*, 2019).

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa celah di atas dengan memberikan bukti empiris terkait bagaimana SIPD dapat berfungsi sebagai variabel kunci dalam meningkatkan

kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah. Di sisi lain, dengan meneliti hambatan implementasi dan memberikan solusi yang berfokus pada peningkatan kompetensi SDM, penelitian ini juga dapat memperkuat argumen bahwa sistem informasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan SDM yang menggunakannya. Dengan demikian, kebaruan disertasi ini terletak pada eksplorasi mendalam mengenai pengaruh SIPD terhadap kualitas laporan keuangan, di mana sebelumnya belum banyak penelitian yang meneliti sistem ini secara komprehensif di tingkat pemerintah daerah, serta menjadikannya variabel yang berkorelasi dengan SPIP dan kompetensi SDM.

Adapun tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga berusaha untuk mengevaluasi pengaruh interaksi antara SIPD dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, serta pengaruh interaksi antara SPIP dan kompetensi sumber daya manusia dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah erat kaitannya dengan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak yang memegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20). Dalam konteks organisasi sektor publik, praktik pelaporan keuangan didasarkan pada konsep teori keagenan. Teori keagenan mengungkapkan adanya hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan agen (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat) yang didasari oleh pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung risiko, pembuatan keputusan, dan pengendalian fungsi-fungsi (Jensen & Meckling, 1976). Dalam kerangka teori keagenan, akuntabilitas merujuk pada mekanisme dan proses yang diterapkan untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Ijiri, 1983).

Dalam pemerintahan, penerapan teori keagenan memerlukan mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa aparat pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan aktivitas, sistem reward and punishment, serta mekanisme lainnya yang dapat memotivasi aparat pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik (Streim, 1994). Untuk mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan, pemerintah pusat diharapkan memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, guna memaksimalkan kapasitas dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan (Abdullah *et al.*, 2020).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019, SIPD dirancang untuk mengelola data informasi keuangan daerah dengan lebih efektif dan efisien, sambil tetap menjunjung tinggi asas akuntabilitas dan transparansi. Sistem ini mencakup berbagai elemen pengelolaan keuangan daerah, seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Penelitian oleh Prameswari (2022) dan Dian *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa penerapan SIPD memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini diperkuat oleh temuan Orlanda *et al.* (2020), yang menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) juga berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menerapkan teori Agensi, pemerintah daerah dapat menciptakan insentif dan mekanisme pengendalian yang sesuai, sehingga memastikan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan

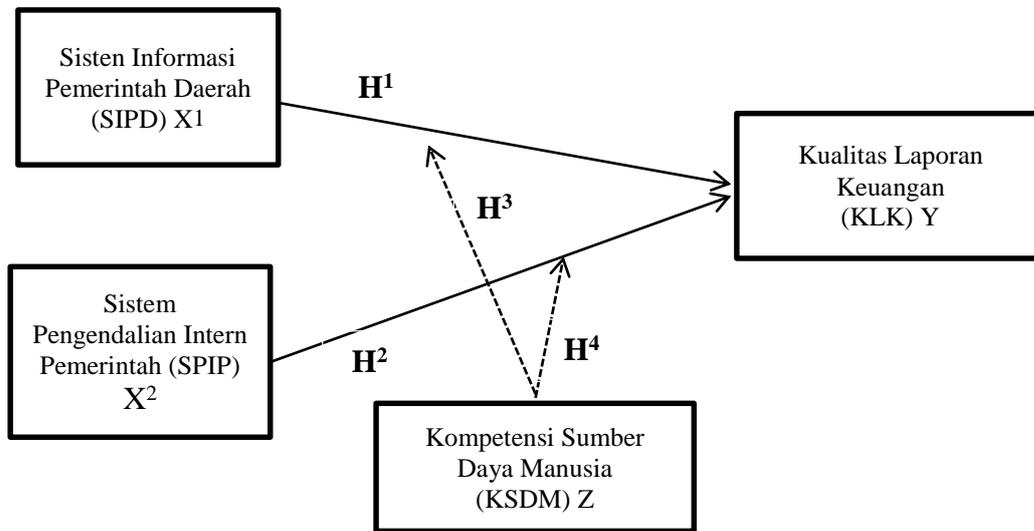
dapat dipercaya. Selain itu, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan SIPD berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam penggunaan sistem ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, **hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa penerapan SIPD (X1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y).**

Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga berkontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tujuan SPIP adalah memberikan jaminan yang memadai terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip teori COSO yang diterapkan dalam SPIP memungkinkan pemerintah untuk memperkuat sistem pengendalian intern yang mendukung kualitas laporan keuangan yang lebih baik, dengan mengurangi risiko kesalahan dan penyelewengan. Penelitian Indrayani *et al.* (2020) dan Orlanda *et al.* (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh temuan dari Nurillah *et al.* (2014) dan Agbenyo (2018), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip SPIP, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas tinggi. **Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa SPIP (X2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y).**

Lebih lanjut, kompetensi sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam memperkuat hubungan antara penerapan SIPD dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, kompetensi SDM sangat diperlukan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), seperti yang diungkapkan oleh Indrayani *et al.* (2020). Kompetensi SDM yang baik memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam organisasi berjalan lebih efektif dan efisien (Yeni *et al.*, 2020). Penerapan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern, bersama dengan kompetensi SDM yang memadai, secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Laitera i *et al.* (2021) dan Indrayani (2020). Oleh karena itu, untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang tinggi, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa SDM memiliki tidak hanya keahlian di bidang teknologi informasi, tetapi juga pemahaman mendalam tentang logika akuntansi dalam konteks SIPD. **Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa kompetensi SDM (Z) memoderasi pengaruh SIPD (X1) terhadap kualitas laporan keuangan.**

Terakhir, dalam konteks SPIP, kompetensi SDM juga menjadi faktor kunci yang memperkuat hubungan antara pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, SPIP adalah proses yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pegawai untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. SDM yang unggul dan kompeten mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai standar, seperti yang dijelaskan oleh Agung *et al.* (2018) dan Indrayani *et al.* (2020). Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa kompetensi SDM (Z) memoderasi pengaruh SPIP (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Berdasarkan uraian diatas dan mencermati permasalahan dan tujuan penelitian dan kajian teori, maka kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konsep
 Sumber : Data primer diolah, 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Data penelitian dikumpulkan di Kabupaten Tojo Una-Una, yang telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) secara penuh dan memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan di tahun 2024.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sekaran dan Bougie (2017). Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala *numerik* (angka). Data kuantitatif diukur dalam skala numerik, sementara data kualitatif berupa informasi yang tidak dapat diukur dengan angka. Data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden yang merupakan bagian dari pengelola keuangan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tojo Una-Una, seperti Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan, Kasubag Keuangan, Bendahara, serta staf keuangan OPD dan staf Bidang Akuntansi di BPKAD. Menurut Sekaran dan Bougie (2017) data dapat diperoleh berdasarkan sumbernya dikelompokkan dalam sumber data Primer dan data Sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala ordinal lima poin. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, seperti laporan keuangan dan arsip lainnya.

Menurut Sugiyono (2015) pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik melalui Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari responden, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden terkait persepsi responden terhadap variabel-variabel

penelitian, dan observasi dilakukan untuk mengamati langsung kegiatan terkait objek penelitian. Kuesioner yang digunakan diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel utama yang diukur menggunakan skala *ordinal Likert* dengan rentang skor 1 hingga 5. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persepsi responden terhadap setiap variabel yang diteliti, di mana skor 1 mewakili "sangat tidak setuju" dan skor 5 mewakili "sangat setuju".

Pertama, variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diukur berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kualitas laporan keuangan diukur melalui empat indikator utama, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Setiap indikator diukur dengan item pernyataan yang menggambarkan bagaimana kualitas laporan keuangan dipersepsikan oleh responden.

Kedua, variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah mengacu pada Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keandalan sistem informasi ini meliputi perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, serta akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Responden diminta untuk menilai keefektifan sistem informasi tersebut dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Ketiga, variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diukur berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern. Pengukuran dilakukan melalui lima indikator, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Setiap indikator menggambarkan seberapa baik sistem pengendalian intern pemerintah diimplementasikan.

Keempat, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia akan diukur dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A Tahun 2003 tentang standar kompetensi jabatan struktural. Pengukuran dilakukan melalui tiga indikator, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap/perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Indikator ini membantu mengukur sejauh mana kompetensi sumber daya manusia berkontribusi terhadap efektivitas organisasi.

Populasi penelitian adalah seluruh OPD di Kabupaten Tojo Una-Una, yang terdiri dari 40 OPD. Menurut Sugiyono (2012) *sampling jenuh* merupakan metode yang mengambil keseluruhan dari jumlah populasi yang tersedia. Karena jumlah populasi yang kurang dari 30 responden pada beberapa kategori, penelitian ini menggunakan metode *non-probabilistic sampling* dengan teknik sampel jenuh. Teknik ini mengikutsertakan seluruh populasi dalam penelitian untuk mengurangi *margin of error*.

Data dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan data yang dikumpulkan dalam bentuk tabel, grafik, atau statistik sederhana seperti rata-rata dan standar deviasi. Sementara itu, analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan metode *Partial Least Square (PLS) - Structural Equation Modeling (SEM)*. Metode *PLS-SEM* ini dipilih karena kemampuannya untuk menguji hubungan kompleks antar variabel dengan banyak indikator, baik yang bersifat *reflektif* maupun *formatif*. Analisis ini dilakukan menggunakan software *WarpPLS 8.0*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan gambaran tentang karakteristik responden dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, meliputi jenis kelamin, usia, jabatan, organisasi perangkat daerah (OPD), pendidikan, dan masa kerja. Data menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (52,3%), dengan proporsi perempuan sebesar 47,7%, mengindikasikan dominasi laki-laki dalam jabatan struktural. Sebagian besar responden berada pada kelompok usia >40-50 tahun

(39,8%), yang mencerminkan tingkat pengalaman dan produktivitas yang tinggi. Dari segi jabatan, sebagian besar adalah staf bidang keuangan, bendahara OPD, dan operator SIPD (36%), sementara pejabat eselon IV (28,1%) dan II (28,9%) juga terwakili dengan signifikan. Responden terbanyak berasal dari BPKAD (8,6%) dan OPD lainnya dengan kontribusi masing-masing 2,3%, menunjukkan distribusi yang merata dari berbagai OPD. Dalam hal pendidikan, mayoritas responden memiliki gelar sarjana (S1) sebanyak 63,3%, diikuti oleh magister (S2) sebesar 20,3%, dengan latar belakang pendidikan lainnya menyumbang proporsi yang lebih kecil. Sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun (84,4%), menambah keandalan data yang diberikan.

Adapun perhitungan analisis deskriptif berdasarkan persentase jawaban responden terhadap pernyataan penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata mean dari setiap indikator yang diajukan untuk menggambarkan persepsi seluruh responden. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Descriptive Statistics

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
SIPD	28	4.22	4.52	4.40	0.08
SPIP	28	4.00	4.37	4.19	0.12
KLK	28	4.32	4.48	4.38	0.05
KSDM	28	4.05	4.57	4.29	0.18

Sumber : Data primer diolah, 2024

Analisis variabel penelitian menunjukkan persepsi positif terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan nilai rata-rata 4,40, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4,19, Kualitas Laporan Keuangan (KLK) 4,38, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) 4,29, menandakan bahwa responden merasa cukup puas dengan sistem dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang ada.

Pengukuran dari *Convergent validity* adalah dengan melihat nilai AVE (*Average Variance Extracted*), bahwa AVE yang digunakan untuk evaluasi validitas konvergen, kriteria yang harus dipenuhi yaitu $AVE > 0,50$. Berikut ini nilai AVE setiap konstruk dapat dilihat tabel di bawah:

Tabel 2 Output Latent Variable Coefficients

Variabel	Avg. Var. Extrac (AVE)
Sistem Informasi Pemerintah (SIPD)	0,574
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,519
Kualitas Laporan Keuangan (KLK)	0,617
Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)	0,576

Sumber : Data primer diolah, 2024

Keempat konstruk telah memenuhi *convergent validity* karena SIPD memiliki nilai AVE $0,574 > 0,50$, SPIP memiliki nilai $0,519 > 0,50$, KLK memiliki nilai $0,617 > 0,50$, dan KSDM memiliki nilai $0,576 > 0,50$. Kesimpulan dari semua variabel telah memenuhi kriteria *convergent validity*.

Pengujian realibilitas konstruk yang dapat diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. *Composite Reliability data yang memiliki composite reliability* $> 0,8$ mempunyai reliabilitas yang tinggi. *Average Variance Extracted (AVE)* diharapkan $> 0,5$ dan nilai *cronbach's alpha* dinyatakan reliabel diharapkan $> 0,6$ untuk semua konstruk. Berikut ini hasil dari *output latent variable coefficients*, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 Composite Reliability dan Cronbach's alpha

<i>Variabel</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's alpha</i>
Sistem Informasi Pemerintah (SIPD)	0.930	0.915
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0.922	0.906
Kualitas Laporan Keuangan (KLK)	0.947	0.938
Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)	0.912	0.891

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 3, dijelaskan keempat konstruk telah memenuhi kriteria reliabel karena SIPD memiliki nilai *composite reliability* diatas $0,930 > 0,70$ dan nilai *Cronbach's alpha* di atas $0,915 > 0,60$, SPIP memiliki nilai *composite reliability* $0,922 > 0,70$ dan nilai *Cronbach's alpha* di atas $0,906 > 0,60$, KLK memiliki nilai *composite reliability* diatas $0,947 > 0,70$ dan nilai *Cronbach's alpha* di atas $0,938 > 0,60$, dan KSDM memiliki nilai *composite reliability* diatas $0,914 > 0,70$ dan nilai *Cronbach's alpha* di atas $0,891 > 0,60$, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* di atas $0,70$ dan nilai *Cronbach's alpha* di atas $0,60$ sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

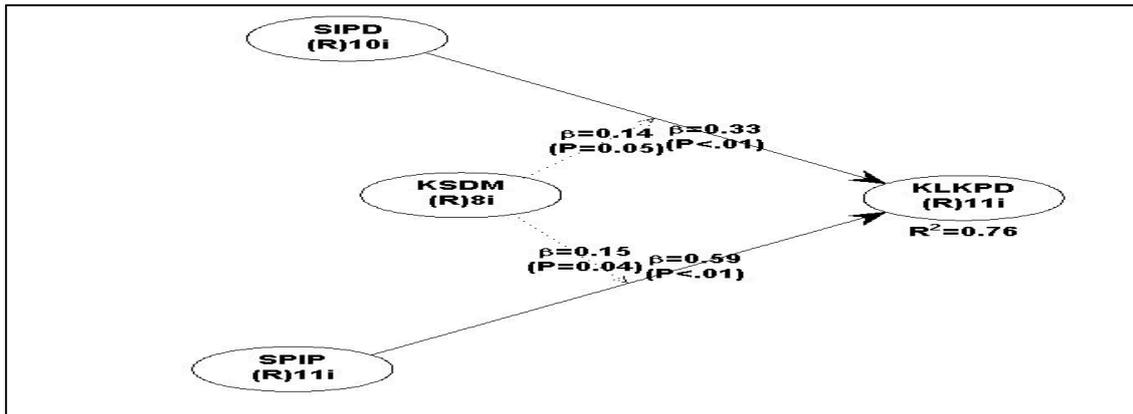
Hasil *evaluasi structural (Inner Model)* yang meliputi uji kecocokan model (*model fit*) *path coefficient* dan R^2 . Untuk menilai hasil suatu model dikatakan fit dalam program *Warp PLS 8.0* dapat dilihat dari *output general results*. Adapun *model fit indices* pada tabel berikut:

Tabel 4 Model Fit and Quality Indices

<i>Model fit and quality indices</i>	<i>Indeks</i>	<i>p-value</i>	Kriteria	Keterangan
<i>Average path coefficient (APC)</i>	0.302	$P < 0.001$	$P < 0.05$	Diterima
<i>Average R-squared (ARS)</i>	0.762	$P < 0.001$	$P < 0.05$	Diterima
<i>Average adjusted R-squared (AARS)</i>	0.755	$P < 0.001$	$P < 0.05$	Diterima
<i>Average block VIF (AVIF)</i>	1.819	$\leq 5, ideally \leq 3.3$		Diterima
<i>Average full collinearity VIF (AFVIF)</i>	2.602	$\leq 5, ideally \leq 3.3$		Diterima
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	0.738	<i>small</i> $\geq 0.1, medium \geq 0.25, large \geq 0.36$		<i>Large</i>
<i>Simpson's paradox ratio (SPR)</i>	1.000	$\geq 0.7, ideally = 1$		Diterima
<i>R-squared contribution ratio (RSCR)</i>	1.000	$\geq 0.9, ideally = 1$		Diterima
<i>Statistical suppression ratio (SSR)</i>	1.000	≥ 0.7		Diterima
<i>Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)</i>	0.625	≥ 0.7		Diterima

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4, nilai yang diperoleh dari sepuluh kriteria sudah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan model tersebut telah memenuhi prasyarat model fit. Maka dengan demikian inner model dapat diterima. Berikut gambar hasil estimasi *model indirect effect* sebagai berikut.



Gambar 2 Model indirect effect
 Sumber : Data primer diolah, 2024

Data *output path coefficients* dan *p-values* yang diperoleh dari pengolahan data Uji Hipotesis 1 (H1) dan Uji Hipotesis 2 (H2), dengan menguji pengaruh langsung atau *direct effect* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Output Path Coefficients Model Direct Effect

Variabel	Path coefficients	P value	Keterangan
SIPD → KLK	0.328	0.001	Diterima
SPIP → KLK	0.586	0.001	Diterima

Sumber : Data primer diolah, 2024

Hasil Uji Hipotesis 1 (H1) Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur (*Path coefficient*) sebesar 0,328 yang signifikan pada tingkat 0,001, lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD, melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan, mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintahan daerah. Dengan nilai rata-rata variabel SIPD sebesar 4,40, yang berada di kategori sangat baik, mengindikasikan adanya dukungan kuat dari para responden terhadap penerapan SIPD. Lebih lanjut, indikator *loading factor* yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh indikator pernyataan X1.10 dengan nilai 0,863, memperkuat bahwa SIPD memainkan peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil ini sejalan dengan teori TAM (*Technology Acceptance Model*) yang mengemukakan bahwa adopsi teknologi, seperti SIPD, dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaannya. Dalam konteks ini, SIPD dianggap berguna karena mampu meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pelaporan keuangan, serta mempermudah pegawai pemerintah daerah dalam proses pengelolaan keuangan. Sebagai hasilnya, kualitas laporan keuangan meningkat, yang berarti laporan menjadi lebih akurat, relevan, dan terpercaya, serta lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung temuan dari studi-studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nasrun *et al.* (2023) dan Dian *et al.* (2018), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan di daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa penerapan SIPD secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan daerah.

Hasil Uji Hipotesis 2 (H2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,586 dan *p-value* sebesar 0,001, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Dengan demikian, hipotesis bahwa SPIP berdampak positif pada kualitas laporan keuangan diterima. Temuan ini sejalan dengan tanggapan responden yang menunjukkan bahwa penerapan SPIP dinilai baik, dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,19. Lebih lanjut, hasil penelitian ini didukung oleh pengukuran reliabilitas yang menunjukkan nilai *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* di atas batas minimum yang direkomendasikan, yaitu >0,70 dan >0,60. Hal ini menunjukkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini reliabel. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Indrayani *et al.* (2020) dan Orlanda *et al.* (2020), yang juga menemukan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Selanjutnya, penerapan SPIP berdasarkan teori pengendalian internal COSO membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap operasi pemerintah. Teori agensi mendukung bahwa pengendalian internal yang efektif seperti SPIP diperlukan untuk memastikan bahwa aparat pemerintah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai harapan. Dengan demikian, penerapan SPIP yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, mengurangi risiko kesalahan dan penyelewengan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Novandalina (2021) yang mengemukakan bahwa Pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh tingkat sistem pengendalian internal yang berlaku, semakin baik maka pencegahan *fraud* akan semakin efektif. Sehingga temuan ini menunjukkan pentingnya penerapan SPIP yang efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan, pada gilirannya, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Data output *path coefficients* dan *p-values* yang diperoleh dari pengolahan data Uji Hipotesis 3 (H3) dan Uji Hipotesis 4 (H4), dengan menguji pengaruh tidak langsung atau *indirect effect* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Hasil Output Path Coefficients Model Indirect Effect

Variabel	<i>Path coefficients</i>	<i>P value</i>	Keterangan
SIPD*KSDM → KLK	0.144	0.047	Diterima
SPIP*KSDM → KLK	0.047	0.042	Diterima

Sumber : Data primer diolah, 2024

Hasil Uji Hipotesis 3 (H3) Kompetensi Sumber Daya Manusia memoderasi pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) memiliki pengaruh positif dan signifikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Dengan nilai *path coefficients* sebesar 0,144 dan *p-value* sebesar 0,047, yang lebih kecil dari 0,05, hipotesis ini diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika SDM memiliki kompetensi yang tinggi, kemampuan untuk memanfaatkan SIPD dengan efektif meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini selaras dengan temuan Indrayani *et al.* (2020) dan Yeni *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM memoderasi hubungan antara penerapan sistem informasi keuangan dan kualitas laporan

keuangan pemerintah. Kedua penelitian ini menekankan pentingnya kompetensi SDM dalam meningkatkan efektivitas penggunaan sistem informasi, yang berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dalam konteks teori manajemen SDM yang diuraikan oleh Werther & Davis (1996), pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar.

Lebih lanjut, kompetensi SDM yang memadai tidak hanya mencakup pengetahuan teknis dan pengalaman dalam bidang terkait, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan peraturan serta standar yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kompetensi ini sangat penting untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut hasil penelitian, indikator kompetensi SDM yang paling signifikan dalam mendukung penerapan SIPD adalah pemahaman yang mendalam terhadap SAP dan kemampuan untuk mengidentifikasi risiko yang relevan dengan kegiatan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa SDM yang terampil dan kompeten dapat secara efektif mengimplementasikan dan memanfaatkan SIPD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kompetensi SDM, melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, sangat krusial untuk meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori kompetensi dan penelitian-penelitian terdahulu.

Hasil Uji Hipotesis 4 (H4) Kompetensi Sumber Daya Manusia memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) memiliki peran penting sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Dengan nilai *path coefficients* sebesar 0,149 dan *p-value* sebesar 0,042, yang lebih kecil dari 0,05, hipotesis ini diterima. Ini menunjukkan bahwa SDM yang kompeten tidak hanya meningkatkan efektivitas SPIP, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nurillah *et al.* (2014) dan Indrayani *et al.* (2020), mendukung temuan ini, mengindikasikan bahwa kompetensi SDM merupakan faktor penentu dalam memastikan pelaksanaan pengendalian intern yang efektif, yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, SDM yang memiliki kompetensi tinggi, baik dalam pemahaman maupun penerapan SPIP, akan memperkuat hubungan positif antara pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.

Teori Spencer & Spencer (1993) mengenai kompetensi juga mendukung temuan ini, di mana kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik dasar seseorang yang terkait erat dengan kinerja efektif dan dapat digunakan untuk menilai kinerja dengan kriteria tertentu. Dalam konteks pemerintahan, SDM yang kompeten mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara profesional, efektif, dan efisien, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang efektif memerlukan penerapan elemen-elemen pengendalian intern yang baik, dengan menempatkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai pada posisinya. Implementasi SPIP yang efektif dan konsisten, yang didukung oleh SDM yang kompeten, akan meminimalisir risiko kesalahan penyajian laporan keuangan dan memastikan informasi keuangan yang dihasilkan akurat dan andal. Kesimpulannya, kompetensi SDM sangat diperlukan untuk memperkuat pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, menjadikannya elemen kunci dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Berdasarkan hasil analisis, SIPD memiliki pengaruh signifikan dengan koefisien jalur sebesar 0,328 pada tingkat signifikansi 0,001, sementara SPIP menunjukkan pengaruh lebih kuat dengan koefisien jalur sebesar 0,586 dan p-value 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya, baik SIPD maupun SPIP, berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan akurasi, transparansi, dan efisiensi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) juga terbukti memoderasi pengaruh SIPD dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan, dengan SDM yang kompeten mampu meningkatkan efektivitas penerapan kedua sistem tersebut, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Adapun rekomendasi penelitian ini agar OPD dan Pemerintah Daerah lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penerapan SIPD guna meningkatkan dan menjaga kualitas laporan keuangan. Selain itu, SPIP perlu diperkuat secara intensif untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat menjamin kualitas pengelolaan dan laporan keuangan yang andal. Disarankan pula untuk meningkatkan kompetensi dan karakter Sumber Daya Manusia di lingkungan OPD, melalui pelatihan dan bimbingan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dapat mendukung penerapan SIPD dan SPIP secara lebih efisien dan efektif.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di satu pemerintahan daerah, sehingga temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk semua daerah di Indonesia. Kedua, pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang digunakan dalam penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas penerapan SIPD dan SPIP di lapangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan penelitian diperluas dengan melibatkan beberapa daerah yang memiliki karakteristik berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang pengaruh SIPD dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan sistem informasi dan pengendalian internal di pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.I., Masdar, R., Din, M., & Firman, M. F. (2022). Antecedents of the Accountability in Indonesian Local Government Financial Reporting. *International Journal of Professional Business* , Vol. 7 No.5, hal. e0709–e0709.
- Agbenyo, W., Jiang, Y., & Cobblah, P. K. (2018). Assessment of Government Internal Control Systems on Financial Reporting Quality in Ghana : A Case Study of Ghana Revenue Authority Assessment of Government Internal Control Systems on Financial Reporting Quality in Ghana : A Case Study of Ghana Revenue A. *International Journal of Economics and Finance*, 10(11), 40–50. <https://doi.org/10.5539/ijef.v10n11p40>.
- Arens, dkk. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una .2022. *Profil Kepegaiwan Kabupaten Tojo Una-Una*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD).2022. *Laporan Keuangan Kabupaten Tojo Una-Una*.
- Comitte of Sponsoring Organizations of Treadway Comission (COSO). (2013). *Internal Control-Integrated Framework*. Durhan.

- Desipradani & Nuraini, 2018. Variabel Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Majalah Ekonomi*, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Vol. 23, No.2, Hal. 264-285
- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir). *PEKBIS*, 12(1).
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*. Vol. 33 No.5, hal. 535–559
- Ghozali, I, 2011. Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro, Semarang
- Ghozali, I. (2016). Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu
- Ghozali, I., & Latan, H. (2014). Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPls 5.0 (Third). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ijiri, Y. (1983). On the accountability-based conceptual framework of accounting. *Journal of accounting and public policy*, 2(2), 75-81.
- Indrayani & Widiastuti, 2020. Pengaruh Sitem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol 4, No. 1
- Jensen & Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure, *Journal of Financial and Economics*, 3:305-360
- Laitera, F., Ahuluheluw, N., & Laitupa, M. F. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Kabupaten Maluku Barat Daya). *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(2), 74-80.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik edisi kedua. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Naida, N., Amir, A. M., Din, M., & Karim, F. (2023). The Effect of Implementing Local Government Information System on the Quality of Local Government Financial Reports Moderated by Human Resource Competence. *Journal of World Science*, 2(8), 1123-1129.
- Novandalina, A., Sarbullah, S., & Adriyanto, A. T. (2021, December). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Anti-Fraud Awareness Dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank BCA KCU Semarang. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (Vol. 4, No. 1, pp. 224-234).
- Orlanda, Gowon & Erwati, 2020. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas-Dinas Di Provinsi Jambi). *Jurnal Jambi Accounting Review (JAR)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Vol.1, No.2, Hal 165-183
- Prameswari, N. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 Di Kabupaten Purbalingga (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Putra, F. D. 2018. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD se-Kabupaten Bintan. *JOM Fekom*, Vol 1. ED 1. Hal 1-13
- Raharjo, E. 2007. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
- , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
- , Keputusan Kepala BKN, 2003. Nomor 46A tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- , Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor 903/9293/KEUDA perihal Persiapan Pelaksanaan APBD TA 2022.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan keahlian. West Sussex: Wiley. Penerbit Salemba Empat.
- Spencer, Lyle M. & Spencer, Signe M. 1993. Competence at Work: Models for Superior Performance. New York.
- Streim, H. (1994). Agency problems in the legal political system and supreme auditing institutions. Eur. JL & Econ., 1, 177.
- Sugiyono, 2012. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Werther, W & Davis, K 1996, Human resources and personnel management, New York: McGraw-Hill, Inc.
- Zubaidi, Cahyono & Maharani.2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. International Journal of Social Science and Business, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember. Vol. 3, No. 2, Hal. 68